

# RENSTRA



( RENCANA STRATEGIS )

## 2025 - 2029

**KECAMATAN PARANG  
KABUPATEN MAGETAN**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	55
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	55
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	55
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	55
2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah.....	56
2.2.1. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah.....	56
2.2.2. Isu Strategis.....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	60
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	66
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	67
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	68
4.1. Program, Kegiatan dan Sub- kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading dari</i> Tujuan , Sasaran , Outcome dan Output.....	68



4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.....	87
4.3. Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.....	112
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	113
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	115
BAB V PENUTUP.....	116



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan ASN .....	33
Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan .....	35
Tabel 2. 3 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	35
Tabel 2. 4 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan .....	36
Tabel 2. 5 Jumlah SDM Berdasarkan Usia.....	36
Tabel 2. 6 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana.....	37
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parang .....	40
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parang.....	49
Tabel 2. 9 Isu Strategis .....	57
Tabel 3. 1 .....	65
Tabel 3. 2 Penahapan Strategi Kecamatan Parang.....	66
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Kecamatan Parang .....	67
Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Parang .....	69
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Parang tahun 2025-2029 .....	88
Tabel 4. 3 Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	112
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parang.....	113
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Parang .....	115



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	42
Grafik 2. 2 Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik.....	43
Grafik 2. 3 Nilai SAKIP Kecamatan Parang .....	47
Grafik 2. 4 Capaian Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( % ).....	50
Grafik 2. 5 Capaian Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (%).....	51
Grafik 2. 6 Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%) .....	52
Grafik 2. 7 Capaian Realisasi Anggaran Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%).....	53
Grafik 2. 8 Capaian Realisasi Anggaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) .....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam upaya mendukung hal tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun. Renstra ini disusun dalam rangka menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ke dalam rencana teknis sektoral yang menjadi pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai salah satu perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan memainkan peran strategis dan krusial sebagai ujung tombak pemangku urusan kewilayahan dalam pembangunan daerah. Sebagai perangkat daerah kabupaten di tingkat wilayah, kecamatan berfungsi menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap pembangunan di wilayah kerjanya. Peran strategisnya terwujud melalui kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan dari tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat kelurahan/desa, memastikan harmonisasi dan sinergi antarsektor. Dengan posisinya yang paling dekat dengan masyarakat, kecamatan bertanggung jawab untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, menangani permasalahan di lapangan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sehingga



efektivitas kinerja kecamatan secara langsung dapat berkontribusi pada terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai dokumen strategis perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parang dalam kurun waktu 2025 hingga 2029 dengan berdasarkan pada visi dan misi kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan. Penyusunannya dilandaskan pada pendekatan objektif dan partisipatif, serta memperhatikan pendekatan politis melalui penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini diharapkan dapat menjamin keselarasan antar sektor, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta kesinambungan antar periode perencanaan. Lebih lanjut, Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Daerah menghadapi sejumlah tantangan dan isu strategis yang kompleks dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan, dengan kecamatan sebagai garda terdepan. Pertama, terjadi kesenjangan kapasitas (*capacity gap*) yang signifikan antara besarnya tanggung jawab yang didelegasikan kepada kecamatan dengan ketersediaan sumber daya, baik dari segi kewenangan, anggaran, peralatan, maupun kualitas sumber daya manusia. Kedua, dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, dan kerawanan bencana, seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan. Ketiga, koordinasi antarinstansi vertikal (seperti POLSEK, KORAMIL) dan horizontal (dinas-dinas daerah) di wilayah kecamatan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan mekanisme kerja yang belum terintegrasi secara optimal. Keempat, disparitas geografis dan sosiologis antar-kecamatan dalam satu daerah menuntut pendekatan pembangunan



yang berbeda, namun kebijakan yang seragam (*one-size-fits-all*) dari pemerintah daerah kerap kali tidak efektif memecahkan masalah spesifik setiap wilayah. Kelima, tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur. Akumulasi dari isu-isu strategis ini berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan dan laju pembangunan daerah jika tidak segera diatasi melalui kebijakan yang holistik dan pemberdayaan kelembagaan kecamatan yang lebih nyata. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas program serta kegiatan dinas agar sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Magetan yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Seluruh isi dokumen ini juga dirancang agar selaras dengan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan, khususnya misi untuk Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan. Dalam konteks ini, Renstra Kecamatan Parang menjadi bagian integral dari upaya daerah dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good governance. Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan, tetapi juga menjadi instrumen pengukuran kinerja, akuntabilitas, dan kontrol terhadap capaian kinerja Kecamatan sebagai bagian pelaksanaan urusan kewilayahan di Kabupaten Magetan. Harapannya, melalui pelaksanaan rencana strategis ini, kecamatan dapat berkontribusi pada upaya reformasi birokrasi yang dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,



adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi yang mengarah pada terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didasarkan pada berbagai landasan hukum yang mengarahkan perencanaan pembangunan daerah. Landasan ini mencakup regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terstruktur dan sesuai dengan visi pembangunan daerah. Regulasi tersebut memberikan pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung kemajuan Kecamatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Kementarian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024–2044.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.
27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen RENSTRA ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.



2. Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Parang dalam urusan kewilayahan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang memuat pokok-pokok kebijakan dan program/ kegiatan/ sub-kegiatan dalam Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2025-2029.

Berdasarkan maksud di atas maka tujuan disusunnya dokumen Renstra ini sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan selama periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun ke depan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang         | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum   |



- 1.3 Maksud dan Tujuan yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 1.4 Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Berisi kelompok sasaran yang



- |  |  |
|--|--|
| Perangkat Daerah   | mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah   |
| 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan                     | Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan                                   |
| 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah              | Berisi uraian Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah                            |
| 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah        | Berisi uraian Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah                      |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah                        |  |
| 2.2.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
| 2.2.2 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah                                   | Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana                 |

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- |  |   |
|--|---|
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029                                      | Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029       | Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang   |
| 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang   |

### **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- |  |   |
|--|---|
| 4.1 Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> | Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> dari pohon kinerja |
|--|---|



- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4.2 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur  | Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif                           |
| 4.3 | Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah  | Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah                                   |
| 4.4 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah. |
| 4.5 | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)                                   | Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah  |

## **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan



oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Parang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

## **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

#### **2.1.1.1 Tugas dan Fungsi**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;



- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;



- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :



- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;



- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP**

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;



- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan mentoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA );
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENSTRA );
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;



- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

**e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;



- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;



- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes);
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;



- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,



pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;



- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;



k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

**2.1.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Parang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

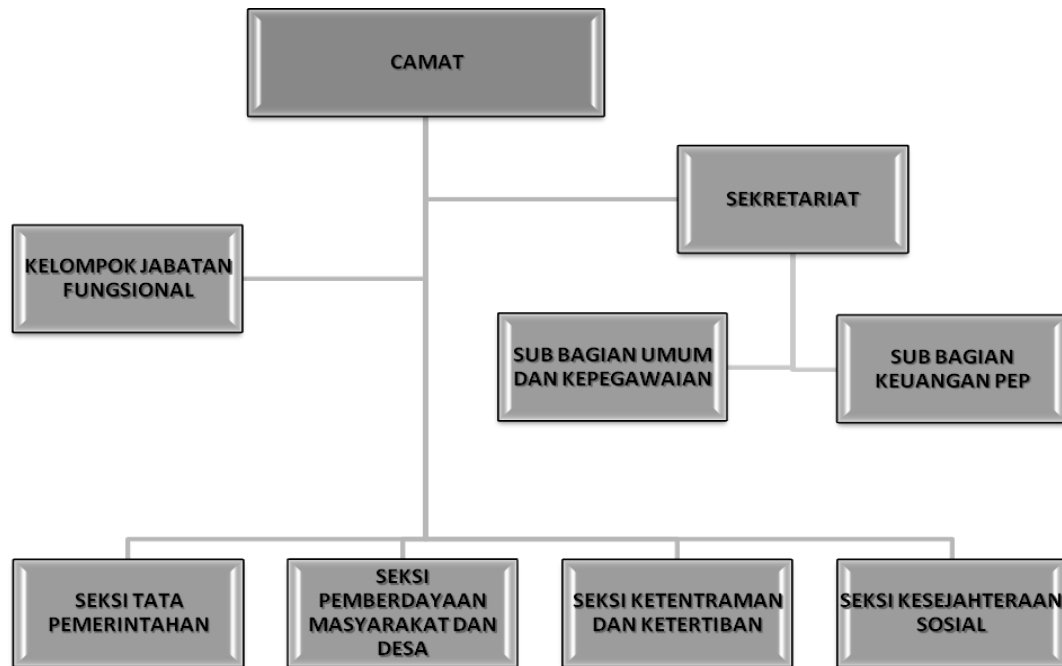
- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP



Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi OPD Kecamatan

## **KELURAHAN**

### **1. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan



- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan



- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### **3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;



- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

c

#### 4 . **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat



- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.



## 5 Seksi Kesejahteraan Sosial

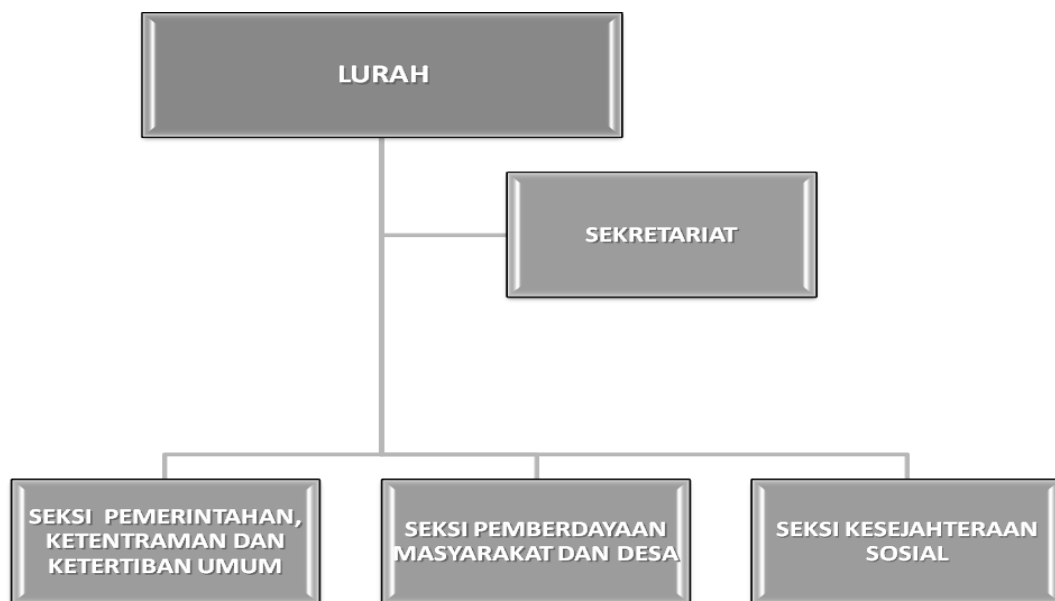
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga



- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



*Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan*

## **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang dimiliki. Untuk



melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, hingga tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan didukung oleh total **18 orang pegawai** termasuk pegawai di Kelurahan Parang. Komposisi pegawai tersebut mencerminkan kapasitas organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jabatan akan disajikan dalam tabel berikut, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur SDM yang ada. Selain sumber daya manusia, dinas ini juga didukung oleh aset fisik, seperti sarana kantor, kendaraan operasional, peralatan teknis, serta unit-unit pelayanan teknis yang masih aktif dan berfungsi dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Keberadaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Renstra ini :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

*Tabel 2. 1 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan ASN*

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-



No	Golongan	L	P	Jumlah
3	Pembina Utama (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-
5	Pembina (IV/a)	1	-	1
6	Penata Tingkat I (III/d)	4	3	7
7	Penata (III/c)	1	1	2
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	1	2
9	Penata Muda (III/a)	-	1	1
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	2		
11	Pengatur (II/c)	-		
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-		
13	Pengatur Muda (II/a)	1	1	2
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-
15	Juru (I/c)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		11	7	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Parang  
Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon



Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			L	P
1.	Camat	IIIa	-	
2.	Sekretaris	IIIb	1	
3.	Kepala Seksi	IVa	3	1
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	-	2
5.	Lurah	IVa	-	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	-	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	3	-
7.	Fungsional Umum		4	2
	Jumlah		11	7

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Parang Kab Magetan

### 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 3 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN						Non ASN		Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		L	P	
		L	P	L	P	L	P			
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SMA Sederajat	2	2	-	-	1	1	3	-	9
3	D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D4	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Tingkat Pendidikan	ASN						Non ASN		Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		L	P	
		L	P	L	P	L	P			
5	S1	7	3	-	-	-	-	1	1	12
6	S2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		11	5	-	-	1	1	4	1	23
<b>Jumlah</b>										23

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Parang Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2. 4 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	5
	Jumlah	6

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Parang Kab Magetan

5. Susunan Kepegawaian yang ada pada Kecamatan Parang berdasarkan Usia

Tabel 2. 5 Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Golongan	PNS		CPNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Usia < 30 tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Usia 30-39 tahun	-	-	-	-	1	-	1	1	3



No	Golongan	PNS		CPNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
3	Usia 40-49 tahun	4	1	-	-	-	-	3	-	8
4	Usia ≥ 50 tahun	6	5	-	-	-	-	-	-	11
<b>Jumlah</b>		10	6	-	-	1	1	4	1	23

### 2.1.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

*Tabel 2. 6 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana*

NO	JENIS ASSET	SATUAN / MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah pertanian	2320 m2	1980	1	B
2.	Tanah bangunan kantor	6225 m2	1980	1	B
3.	Tanah bangunan diklat	10869 m2	1980		B
4.	Mobil	Suzuki APV	2007	1	B
5.	Sepeda Motor	HONDA C.100.ML	2004	1	B
6.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2006	1	B
7.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2007	1	B
8.	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	2008	1	B
9.	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	2006	1	B
10.	Mesin Ketik Manual	-	1999	2	B
11.	Rak Kayu	-	2013	1	B
12.	Band Kas	-	2000	2	B
13.	Lemari Kaca	-	2004	2	B
14.	Papan Nama Instansi	-	2006	1	B
15.	Lemari Kayu	-	2012	1	B
16.	Meja Kayu / rotan	-	2005	4	B
17.	Kursi kayu / rotan	-	2013	2	B



NO	JENIS ASSET	SATUAN / MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
18.	Meja Rapat	-	2003	8	B
19.	Meja Rapat	-	2009	1	B
20.	Meja tulis	-	2000	21	B
21.	Meja tulis		2013	2	B
22.	Meja Podium	-	2005	1	B
23.	Kursi Rapat	-	1999	80	B
24.	Kursi Rapat	-	2003	38	B
25.	Kursi rapat	-	2010	58	B
26.	Kursi rapat	-	2009	1	B
27.	Kursi rapat	-	2013	6	B
28.	Kursi Tamu	-	2004	5	B
29.	Kursi Tamu		2005	2	B
30.	Kursi Tamu		2000	8	B
31.	Meja Komputer	-	2003	9	B
32.	Kipas Angin	Maspion	2013	2	B
33.	Televisi		2010	1	B
34.	Loudspeaker		2013	1	B
35.	Micropone	TOA	2012	5	B
36.	Mic Confrence	-	2010	1	B
37.	Gambar Presiden /Wapres	-	1980	2	B
38.	Tiang Bendera	-	2000	1	B
39.	Mimbar / Podium	-	2009	1	B
40.	P.c. Unit	-	2005	7	B
41.	P.c.Unit	LG/ Pentium 4	2013	1	B
42.	Note Book	Acer	2012	1	B
43.	Hard disk		2010	1	B
44.	Hard Disk	-	2009	1	B
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2000	6	B
46.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2000	21	B
47.	Kursi Rapat Staf	Napolly / 101 -F	2012	45	B
48.	Loudspeaker	-	2005	1	B
49.	Bangunan gedung Kantor Permanen	-	1980	3	B
50.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	-	1980	1	B
51.	Handycam	Sony ACC FV50B	2014	1	B
52.	Sepeda Motor	Yamaha Yupiter Z CW F1	2014	1	B



<b>NO</b>	<b>JENIS ASSET</b>	<b>SATUAN / MERK</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
53.	Papan Data	-	2014		B
54.	Taplak Meja		2014		B
55.	Sepeda Motor	Yamaha Byson	2015	1	B
56.	Rak Kayu	-	2015	2	B
57.	Kursi Rapat	Elepent	2015	20	B
58.	Kursi Tamu	-	2015	1	B
59.	Bangku Tunggu	-	2015	2	B
60.	Loudspeker	TOA	2015	2	B
61.	Microphone	TOA	2015	4	B
62.	Laptop	Acer	2015	1	B
63.	Laptop	Acer one 14	2015	1	B
64.	Laptop	Acer aspire es14	2015	1	B
65.	Printer	Canon	2015	2	B
66.	Printer	Canon ip2770	2015	2	B
67.	Komputer	BEN Q	2016	1	B
68.	Laptop	ASUS	2016	1	B
69.	Printer	Canon ip2770	2016	2	B
70.	Almari Piala	Kaca	2017	2	B
71.	Kursi tunggu	Stainless	2017	2	B
72.	Printer	Canon iP2770	2017	2	B
73.	Meja Panjang	Kayu	2017	1	B
74.	Almari Arsip	Echo	2018	1	B
75.	Komputer	LG	2018	1	B
76.	Kursi Petugas	Campuran	2018	4	B
77.	Speaker aktif	Violence	2018	2	B
78.	Laptop	Acer	2018	1	B
79.	Etalase	Kaca	2018	1	B
80.	Papan visi misi	Mika	2018	1	B
81.	Printer	Epson 380	2018	1	B
82.	Laptop	Acer	2019	4	B
83.	Komputer Set	Acer	2019	2	B
84.	Printer	Epson L3110	2019	2	B
85.	Layar LCD		2019	1	B
86.	Submersible pump	Selva 3"	2021	1	B
87.	Standing microphone	Noise/ NS201	2021	1	B
88.	Microphone wireless	SL Audio	2021	1	B
89.	Termogun	K3X infrared Counter	2021	1	B
90.	Tripod	Zomei	2021	1	B
91.	Laptop	Asus	2022	1	B
92.	Layar Proyektor	-	2022	1	B
93.	Mic on clip	Saramonic	2022	1	B



### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini membahas mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah terkait kepada masyarakat. Dalam proses penyusunan Renstra, evaluasi terhadap kinerja pelayanan ini sangat penting untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, sub-bab ini akan menguraikan berbagai capaian indikator kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Parang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut ini adalah data capaian kinerja pelayanan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tahun 2020-2024:

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parang

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya( IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			✓	78,5	79,5	79,9	80	85,25	79,81	80,22	82,33	85,09	84,96	1,01	1,009	1,03	1,06	0,99

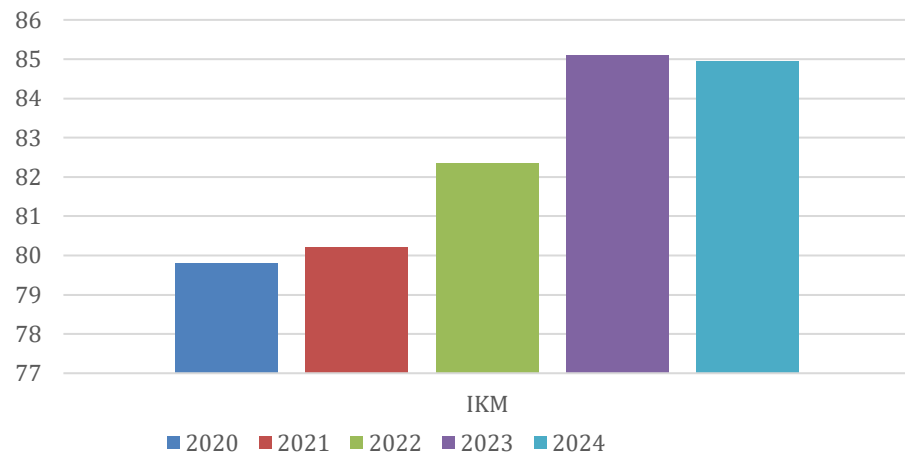


No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			✓		61	65	70			64,6	64,6	80,4			1,059	0,99	1,15		
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			✓					80,50					87,17						1,08
4	Nilai SAKIP Kecamatan Parang			✓					89,69				89,65	89,68						0,99



## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

### Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )



*Grafik 2. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat*

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya Good government dimana kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan public merupakan komponen penting dan utama sebagai indikatornya. Upaya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public harus terus menerus ditingkatkan dan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Parang menunjukkan tren positif yang cukup signifikan dalam hal kualitas pelayanan publik selama kurun waktu lima tahun (2020-2024). Pada tahun 2020, IKM Kecamatan berada di level 79,81 (Kategori B - Baik). Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 80,22, menandai perbaikan berkelanjutan di masa yang penuh tantangan. Momentum positif ini berlanjut dengan lompatan yang lebih besar pada tahun 2022, di mana IKM mencapai 82,33. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan IKM menyentuh angka 85,09. Nilai ini tidak hanya menunjukkan peningkatan dari



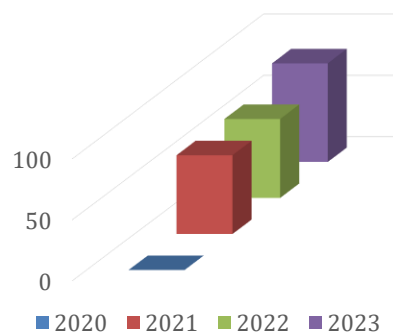
tahun sebelumnya, tetapi juga dapat mencapai kategori A (Sangat Baik), mencapai 106,36 % dari target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 80 nilai , hal ini membuktikan efektivitas berbagai reformasi pelayanan yang diimplementasikan.

Pada tahun 2024, tercatat nilai IKM sebesar 84,96. Meskipun mengalami penurunan yang sangat tipis (0,13 poin) dibandingkan capaian puncak tahun 2023, nilai ini masih secara konsisten berada dalam kategori Sangat Baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai baseline di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan telah berhasil distabilkan pada level yang tinggi. Namun demikian , hal ini patut menjadi perhatian bahwasanya penurunan ini adalah peringatan awal mungkin terjadi kejenuhan atau ada aspek layanan yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kumulatif sebesar 5,15 poin dalam kepuasan masyarakat sejak tahun 2020. Tren ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kecamatan Parang dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus-menerus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima.

## 2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

### Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik



Grafik 2. 2 Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik



Perkembangan nilai kinerja Kecamatan menunjukkan tren positif dan signifikan. Tahun 2020 , indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada fase awal penerapan (Tahun 2021 dan 2022), nilai bertahan konstan pada level 64,60, yang mengindikasikan periode stabilisasi dan pemahaman terhadap instrumen penilaian. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun 2023, di mana nilai mengalami lompatan eksponensial sebesar 15,44 poin menjadi 80,04 tercapai 114 ,86. Capaian ini dicapai Kecamatan Parang melalui serangkaian kebijakan dan inovasi layanan yang diimplementasikan secara intensif, sehingga dapat mengantarkan Kecamatan pada predikat "Baik".

### **3. Predikat Kinerja Kecamatan**

Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dibandingkan mengenai kinerja suatu kecamatan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai dasar untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut , kecamatan dinilai dari 8 aspek yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10, bahwasanya tugas-tugas camat diantaranya:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah



perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: i. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat



Kecamatan kepada bupati/wali kota; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- kecamatan juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat
- Selain itu kecamatan juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pembantuan

. Pada Tahun 2024, meskipun terjadi perubahan nomenklatur indikator menjadi Nilai Predikat Kinerja Kecamatan , tetapi metodologi penilaian sama dengan penilaian indikator Kecamatan Berpredikat kinerja baik. Kecamatan Parang mampu mencatatkan peningkatan kinerja tertinggi menjadi 87,17 mencapai 108 , 28 % dari target sebesar 80,50 yang ditetapkan di tahun 2024. Meskipun perlu terus ditingkatkan , pencapaian ini



merepresentasikan kematangan sistem pengelolaan kinerja dan menempatkan Kecamatan pada predikat "Sangat Baik"

#### 4. Nilai SAKIP Kecamatan Parang



Grafik 2. 3 Nilai SAKIP Kecamatan Parang

Penilaian SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) telah dilaksanakan sejak lama , namun baru pada tahun 2024 penilaian SAKIP yang dilaksanakan inspektorat menjadi indikator yang ditambahkan dalam penilaian tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagai bagian dari penilaian kinerja. Pengintegrasian SAKIP ke dalam evaluasi ini merepresentasikan paradigma penilaian yang sebelumnya berfokus pada *output* semata, menuju penilaian yang lebih holistik dan berbasis *outcome* serta akuntabilitas proses. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pada pentingnya pengelolaan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. SAKIP mengevaluasi keseluruhan siklus manajemen kinerja sebuah instansi pemerintah. Penilaiannya mencakup beberapa elemen diantaranya: Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan

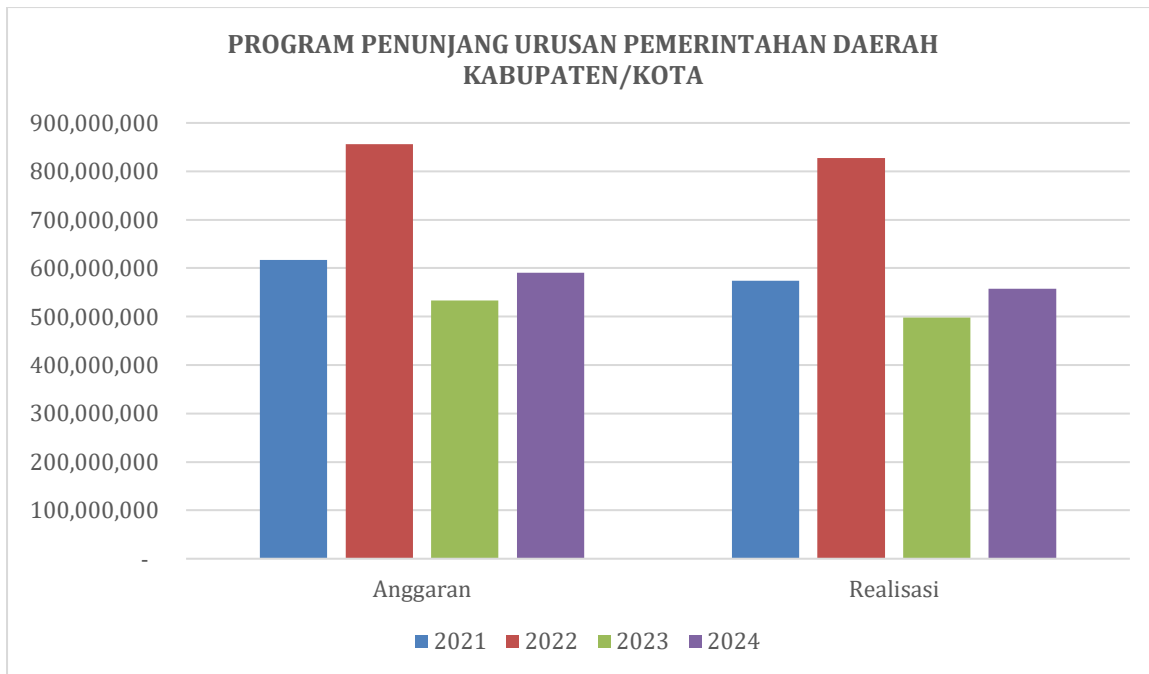


Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Meskipun penetapan SAKIP sebagai salah satu indikator kinerja Kecamatan baru dilaksanakan di tahun 2024 , namun penilaian SAKIP telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Dimana pada tahun 2023 Kecamatan Parang mendapatkan nilai 89,65 dan tahun 2024 mendapatkan nilai 89,68 . Meskipun terdapat kenaikan , namun nilai tersebut baru mencapai 99,99 % dari target yang ditentukan sebesar 89,69 pada tahun 2024. Hal tersebut mencerminkan perlunya perbaikan kinerja pada Kecamatan Parang sehingga dapat tercapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan .



Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Parang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341,947,300					323,265,943					94.54						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152,590,400					150,935,405					98.92						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000					4,965,000					99.30						
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	77,062,300					76,690,000					99.52						
Program Pemberdayaan Kelurahan	1,088,059,000					1,062,413,648					97.64						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		617,452,548	856,275,000	533,307,685	590,551,650		573,631,813	827,573,092	498,024,560	557,273,870		92.90	96.65	93.38	94.36	0.04	0.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11,394,650	20,500,000	19,595,150	36,677,500		11,163,000	19,880,000	18,435,000	35,560,000		97.97	96.98	94.08	96.95	0.54	0.55
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		765,748,429	885,000,000	1,014,556,215	902,951,200		688,548,425	817,183,000	987,070,150	883,870,110		89.92	92.34	97.29	97.89	0.06	0.10
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		36,803,537	70,000,000	64,217,150	102,833,150		34,502,000	60,636,000	63,346,000	100,430,000		93.75	86.62	98.64	97.66	0.47	0.46
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12,775,000	16,000,000	15,536,450	32,620,000		12,200,000	15,615,000	15,502,000	28,984,000		95.50	97.59	99.78	88.85	0.44	0.38

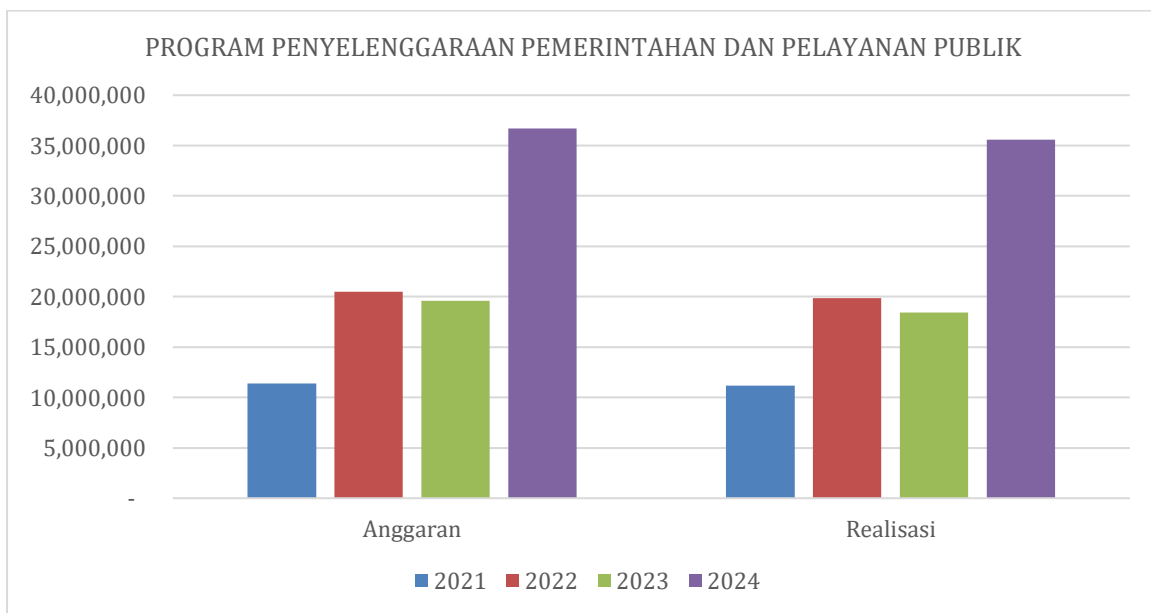


Grafik 2. 4 Capaian Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( % )

Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tren peningkatan efisiensi dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2020 belum tersedia data perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga rasio capaian tidak dapat dihitung, namun sejak tahun 2021 hingga 2024 terlihat adanya perbaikan kinerja yang signifikan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari tahun 2021 hingga 2024, tingkat serapan anggaran menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan rata-rata realisasi mencapai 94,32%. Meskipun terjadi fluktuasi signifikan dalam alokasi anggaran, seperti kenaikan drastis sebesar 38,67% pada tahun 2022 dan penurunan sebesar 37,72% pada tahun 2023, deviasi antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya relatif kecil (rata-rata 3,68%) dan terkendali. Hal ini mengindikasikan efisiensi yang cukup tinggi, dimana selisih anggaran yang tidak terserap tidak bersifat pemborosan, melainkan mencerminkan perencanaan yang terencana dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan alokasi tanpa mengorbankan kualitas output. Realisasi yang konsisten mendekati angka anggaran juga menegaskan bahwa program

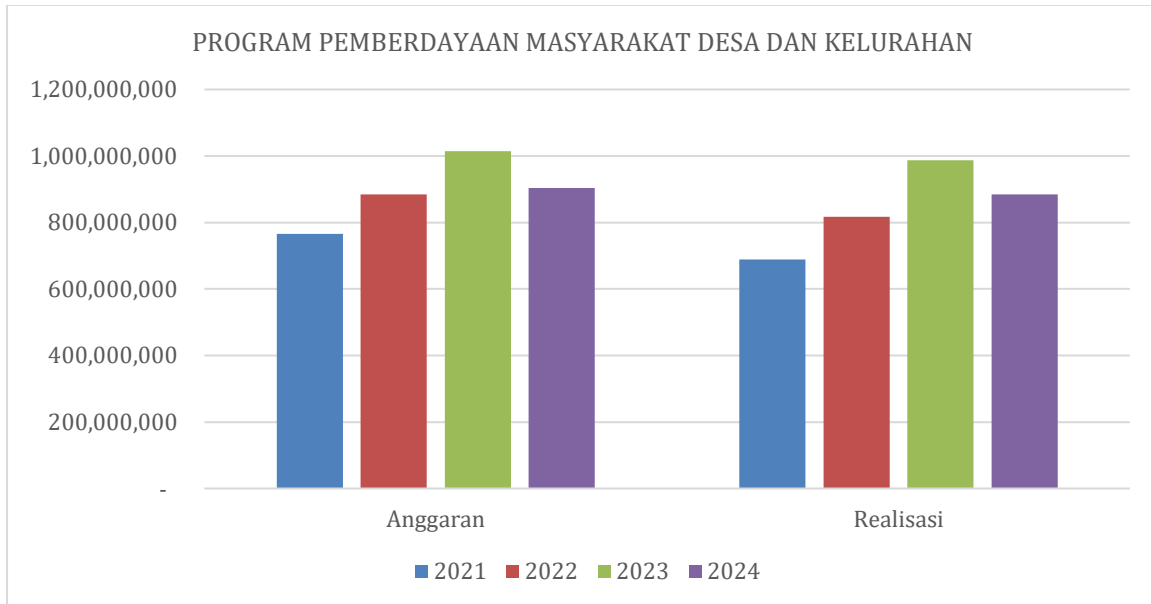


ini dikelola dengan disiplin anggaran yang kuat, sehingga fluktuasi penganggaran tidak mengganggu kinerja operasional secara keseluruhan



Grafik 2. 5 Capaian Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (%)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan alokasi anggaran yang sangat signifikan sebesar 221% dari Rp11,39 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp36,68 Juta pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan prioritas dan komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, realisasi anggaran secara konsisten mencapai persentase serapan yang sangat tinggi, dengan rata-rata 96,5% , mengindikasikan efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan program meskipun menghadapi kompleksitas peningkatan skala anggaran. Deviasi yang terjadi relatif kecil dan konsisten (rata-rata 3,5%), yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti efisiensi belanja, optimalisasi biaya, dan kemungkinan penyesuaian teknis selama pelaksanaan, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi tidak mencerminkan inefisiensi, melainkan perencanaan yang akurat dan pengelolaan keuangan yang hati hati dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan nilai manfaat optimal tanpa terjadinya pemborosan .

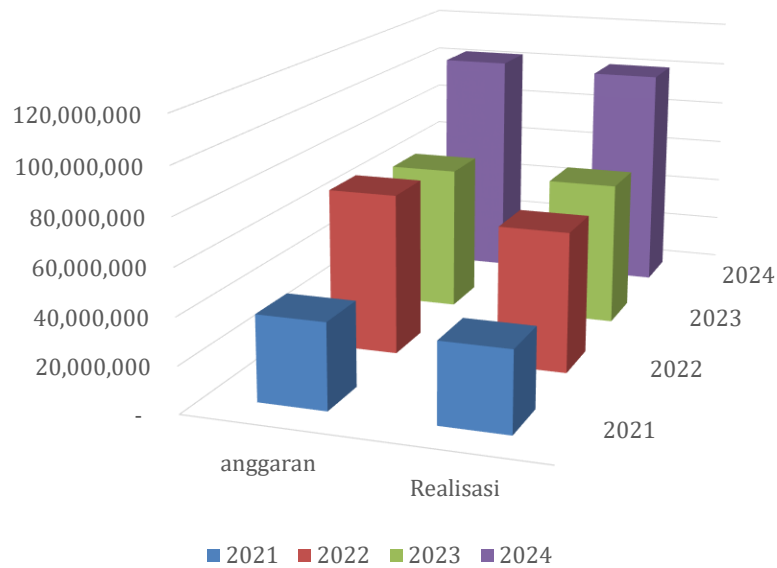


Grafik 2. 6 Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (%)

Selama periode 2021 hingga 2024, Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan menunjukkan tren realisasi anggaran yang stabil dan berada pada kategori tinggi. berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi peningkatan alokasi anggaran yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dimulai dari Rp765,7 juta pada tahun 2021, naik menjadi Rp885 juta pada tahun 2022, dan mengalami puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp1,014,6 miliar, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp902,9 juta. Di sisi lain, realisasi anggaran secara konsisten mencapai persentase serapan yang sangat baik, dengan rata-rata 95,2% , yang menunjukkan peningkatan kinerja penyerapan dari tahun ke tahun dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Deviasi yang terjadi relatif kecil dan semakin mengejar (rata-rata di bawah 5%), dengan tren persentase realisasi yang terus meningkat, mengindikasikan bahwa program ini dikelola dengan perencanaan yang semakin matang, pengawasan yang ketat, dan adaptasi yang baik terhadap dinamika anggaran, sehingga setiap alokasi yang disediakan dapat dimanfaatkan secara hampir optimal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tanpa terjadinya pemborosan anggaran

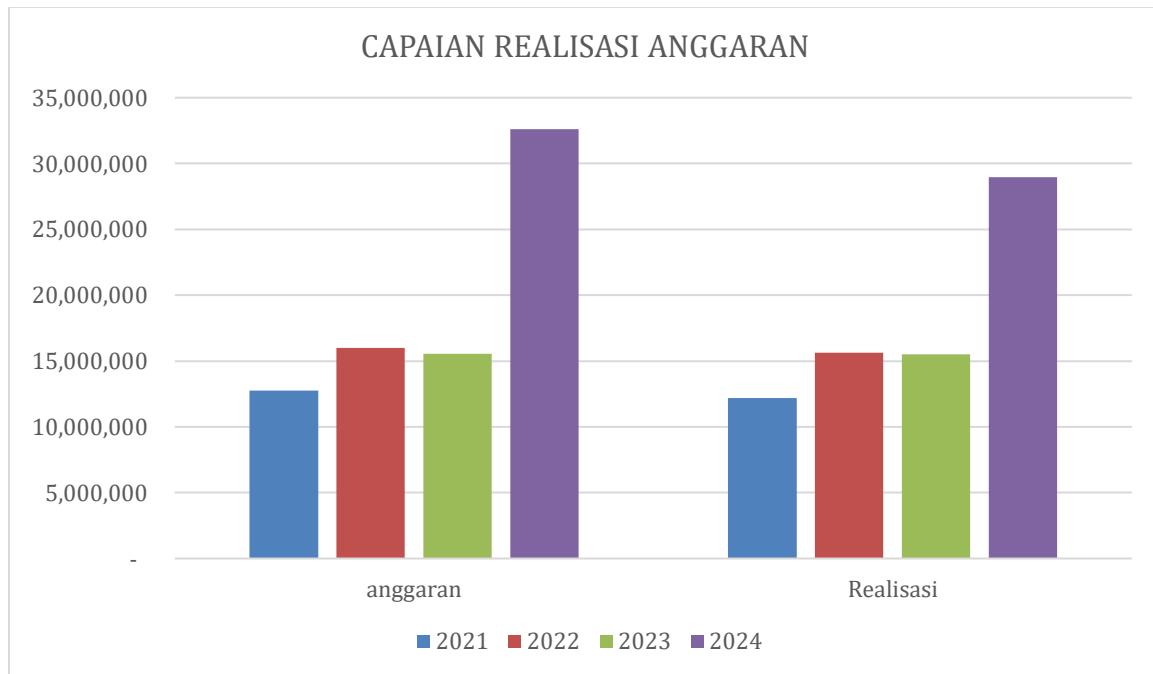


## PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Grafik 2. 7 Capaian Realisasi Anggaran Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari tahun 2021 hingga 2024, alokasi anggaran mengalami peningkatan signifikan sebesar 179% dari Rp36,8 juta pada tahun 2021 menjadi Rp102,8 juta pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan prioritas dalam menjaga ketertiban umum. Namun, realisasi anggaran berfluktuasi dengan persentase serapan tertinggi pada tahun 2023 (98,64%) dan terendah pada tahun 2022 (86,62%), dengan deviasi negatif yang paling besar terjadi pada tahun 2022 (Rp9,4 juta). Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, di mana pada tahun 2021-2022 penyerapan yang rendah disebabkan oleh kendala teknis seperti penundaan pelaksanaan kegiatan koordinasi akibat pembatasan sosial, sementara tingginya realisasi pada tahun 2023 dan 2024 (98,64% dan 97,66%) mencerminkan efektivitas pelaksanaan program yang telah dioptimalkan melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait. Naik turunnya realisasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kondisi keamanan lingkungan yang memerlukan penyesuaian anggaran tak terduga, serta faktor internal seperti efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.



Grafik 2. 8 Capaian Realisasi Anggaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2021 hingga 2024, alokasi anggaran mengalami peningkatan signifikan sebesar 155% dari Rp12,8 juta pada tahun 2021 menjadi Rp32,6 juta pada tahun 2024, mencerminkan komitmen yang semakin kuat dalam mendukung tata kelola desa yang akuntabel. Realisasi anggaran menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik dengan rata-rata di atas 95% , meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan persentase serapan menjadi 88,85% yang disebabkan oleh perubahan skala prioritas kegiatan pembinaan atau penundaan sebagian kegiatan pengawasan akibat proses verifikasi data yang memerlukan waktu lebih lama. Fluktuasi kecil dalam realisasi, seperti deviasi minimal pada tahun 2023 (hanya Rp34,450), menunjukkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur, sementara penurunan serapan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya penyesuaian strategi untuk memastikan kualitas output program seperti peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengawasan penggunaan dana desa tetap tercapai meski dengan realisasi yang sedikit lebih rendah



#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Sebagai Organisasi Perangkat daerah , Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kecamatan memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam dan multidimensi. Kelompok sasaran Layanan Kecamatan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat terdiri dari individu dan kolektif warga masyarakat yang menjadi penerima akhir (*end-user*) dari seluruh pelayanan publik dan program pembangunan yang diselenggarakan oleh Kecamatan. Pemetaan Kelompok Masyarakat tersebut didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi dan kebutuhan spesifik. Secara umum , kelompok masyarakat tersebut mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan. Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Sebagai perangkat daerah kabupaten di tingkat wilayah, kecamatan berfungsi menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap pembangunan di wilayah kerjanya. Peran strategisnya terwujud melalui kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan dari tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat kelurahan/desa, memastikan harmonisasi dan sinergi antarsektor. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut , Kecamatan bermitra dengan Desa/Kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,serta instansi vertikal seperti Polsek, Koramil dan dinas instansi yang berada di kecamatan sehingga program kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti di tingkat Kecamatan.

#### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya Kecamatan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

#### **2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Sebagai perangkat daerah penunjang , Kecamatan tidak memiliki kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.



## **2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
  - keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan.
  - Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan
2. Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan
  - Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur
3. Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertical dan horizontal di wilayah Kecamatan
  - koordinasi antarinstansi vertikal (seperti POLSEK, KORAMIL) dan horizontal (dinas-dinas daerah) di wilayah kecamatan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan mekanisme kerja yang belum terintegrasi secara optimal
4. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis
  - Dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi , kerawanan bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan
  - koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi



### 2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Tabel 2. 9 Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan.	Agenda Reformasi Birokrasi Nasional, termasuk penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks dan cepat.	Penguatan Kelembagaan Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi antar Perangkat Daerah/ stakeholder terkait



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertical dan horizontal di wilayah Kecamatan		Kompleksitas masalah global (ekonomi, kesehatan, lingkungan) yang menuntut koordinasi lintas sektor sampai ke level kecamatan	Program nasional lintas sektor (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial) yang membutuhkan penguatan koordinasi kecamatan dengan instansi vertikal.	Banyaknya program lintas sektor di tingkat daerah yang harus diimplementasikan di wilayah kecamatan	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi di wilayah kecamatan
	Rendahnya Kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan		Tuntutan global terhadap profesionalisme aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang	Agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN	Perubahan kebutuhan masyarakat lokal yang menuntut aparatur kecamatan lebih adaptif, responsif, dan profesional	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan			
	Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis		Globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang mendorong perubahan cepat dalam pola sosial-ekonomi wilayah	Agenda transformasi digital nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi, dan interaksi kewilayahan	Mobilitas penduduk antarwilayah yang berdampak pada kebutuhan layanan administrasi kependudukan, sosial, dan ekonomi di kecamatan	Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi terkait Pembangunan desa/kelurahan serta peningkatan kemampuan adaptasi kecamatan terhadap dinamika kewilayahan



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Magetan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan”**

Misi Kabupaten Magetan dalam mendukung pencapaian visi diatas Adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat.

Misi ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan mampu bersaing di era global. Esensinya terletak pada pembentukan SDM yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis sesuai kebutuhan pasar kerja, tetapi juga memiliki daya adaptasi tinggi, kreativitas, serta nilai-nilai integritas. Misi ini bertujuan menghasilkan tenaga kerja produktif yang dapat menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.

2. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Misi ini mencerminkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian, dengan mendorong hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta tetap memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan . Misi ini berfokus pada penciptaan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang tidak hanya meningkatkan



pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara berkelanjutan serta menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan

Misi ini mencerminkan upaya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good governance . Misi ini berfokus pada reformasi birokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.

4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat secara produktif, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Esensinya terletak pada penciptaan kemandirian masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha, didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang inklusif serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal.

5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran



Misi ini mencerminkan strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi, mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja melalui penguatan kewirausahaan. Fokus dari misi ini ada pada sinergi antara pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan kompetensi SDM, dan optimalisasi sektor unggulan berbasis kreativitas dan keunikan lokal, sehingga tidak hanya menarik minat investor tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha mandiri.

6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah

Misi ini mencerminkan komitmen pemerataan pembangunan di Kabupaten Magetan khususnya wilayah utara-selatan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan strategis yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Misi ini berfokus pada pendekatan afirmatif untuk menciptakan konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan publik, dan peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga mampu mendorong distribusi pembangunan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta teknologi digital di daerah tertinggal, misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan peluang ekonomi, mempercepat pertumbuhan wilayah perdesaan, dan memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan akses terhadap fasilitas publik dan pusat-pusat ekonomi.

7. Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta



menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan kelestarian ekologis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Misi ini berfokus pada penciptaan masyarakat yang hidup rukun melalui penguatan toleransi beragama dan pelestarian budaya serta menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, misi ini bertujuan membentuk ekosistem sosial-ekonomi yang berkelanjutan, di mana kemajuan material berjalan selaras dengan ketahanan sosial, keamanan masyarakat, dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Visi dan misi daerah yang telah dirumuskan menjadi pedoman utama dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Magetan ke depan. Visi daerah mencerminkan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi daerah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi tersebut, perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, berfungsi sebagai penjabaran yang lebih konkret dan terukur dari visi dan misi daerah. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun tujuan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta potensi dan tantangan yang ada di sektor masing-masing. Tujuan ini harus mampu mengarahkan kegiatan dan



alokasi sumber daya secara tepat agar dapat mewujudkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan perangkat daerah menjadi elemen yang sangat penting dalam menghubungkan visi dan misi daerah dengan pelaksanaan kebijakan yang nyata dan terukur di lapangan.

Tujuan tersebut tidak hanya harus selaras dengan arah pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjawab tantangan yang dihadapi, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **Ketiga**, yakni ***Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsif, adaptif, dan transparan.*** Tujuannya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Parang dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Parang. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Kecamatan Parang pada tahun 2025-2029:



Tabel 3. 1  
Tujuan dan sasaran Kecamatan Parang Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Melaksanakan Kewenangan pemerintah daerah urusan kecamatan Parang  Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Parang		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25 Skor	85,5 Skor	86 Skor	86,5 Skor	87 Skor	87,5 Skor	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Parang	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	88 nilai	88,2 nilai	88,4 nilai	88,6 nilai	88,8 nilai	89 nilai	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Parang	Nilai SAKIP	89.95 skor	90,20 skor	90,40 skor	90,60 skor	90,80 skor	91 skor	



### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Parang.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Parang. Penahapan Renstra Kecamatan Parang seperti tabel di bawah ini :

*Tabel 3. 2 Penahapan Strategi Kecamatan Parang*

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi pelaksanaan awal Renstra dan penguatan dasar sistem dasar, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan regulasi pendukung	Penguatan Penerapan sistem, integrasi layanan, dan peningkatan partisipasi publik	Pendalaman Evaluasi sistem, penyempurnaan berkelanjutan, dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Penyelesaian target indikator strategis, evaluasi akhir pelaksanaan Renstra supaya tercapai peningkatan Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan.



### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Parang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sbb :

*Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Kecamatan Parang*

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melaksanakan Kewenangan pemerintah daerah urusan kewilayahan	Memfasilitasi Program pemberdayaan Masyarakat di setiap lingkungan RT	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif	
			Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
			Optimalisasi pelayanan publik melalui standarisasi layanan publik serta pengembangan inovasi pelayanan	



## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub- kegiatan Perangkat Daerah hasil *Cascading* dari Tujuan , Sasaran , Outcome dan Output**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Parang yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Parang mulai tahun 2025 s.d 2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :



Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Kecamatan Parang

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Parang				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Parang			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Parang		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan</li> <li>- Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan</li> </ul>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bidang Kesejahteraan Sosial		
				Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif</li> <li>2. Jumlah Laporan IKM</li> <li>3. jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi</li> <li>4. jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan</li> <li>5. persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial</li> </ol>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas / Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	Evaluasi Kelurahan	
				<i>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif</i>	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial , kepemudaan , kesehatan , keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Parang		1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan 2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	
				tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			terciptanya ketentraman dan		persentase penyelesaian	PROGRAM KOORDINASI	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ketertiban di wilayah kecamatan Parang		potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	
				Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Parang		1. Nilai indeks Pelayanan Publik 2. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					aktif dan telah ditetapkan		
				Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang efektif di kecamatan	1. jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif 2. jumlah laporan kinerja lembaga pemberdayaan desa / kelurahan terfasilitasi	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Pemberdayaan Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Parang			Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Parang	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kelurahan Parang		Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kelurahan Parang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan Parang	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Parang</i>		1) Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan 2) Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Parang</i>	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<i>Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah</i>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Parang</i>	<p>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Parang	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Parang</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran</i>	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</i>	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Parang</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</i>	<i>2. Persentase deviasi serapan anggaran</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	
				Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keuangan Perangkat Daerah	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD//laporan	



#### **4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur**

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan ini secara konsisten mengacu dan diselaraskan dengan nomenklatur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan standarisasi bidang urusan pemerintahan. Keselarasan dengan nomenklatur ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan keterbandingan data perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat perangkat daerah, pemerintah daerah, maupun dengan tingkat nasional. Secara operasional, acuan nomenklatur diterjemahkan ke dalam struktur perencanaan sebagai berikut:



Tabel 4. 2  
Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Parang tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Parang	1. Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Keseekretariatian // Nilai	84,96	85											
	1. Indeks Kepuasan Layanan keseekretariatian // Skor 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran // %	84,96	85	85.5	2,416,132,893	86	2,536,939,000	86.5	2,663,785,000	87	2,797,000,000	87.5	2,936,850,000	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Parang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Dokumen	18	18	51	4,000,000	51	4,200,000	51	4,500,000	51	4,700,000	51	4,900,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	6	6	6	2,000,000	6	2,100,000	6	2,300,000	6	2,400,000	6	2,500,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perencanaan Perangkat Daerah															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Output : Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	12	12	<b>45</b>	2,000,000	<b>45</b>	2,100,000	<b>45</b>	2,200,000	<b>45</b>	2,300,000	<b>45</b>	2,400,000		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>44</b>	<b>44</b>												
<b>Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</b>	<b>Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %</b>	2,3	<b>2,28</b>	<b>2,25</b>	<b>2,146,232,893</b>	<b>2,20</b>	<b>2.238.739.000</b>	<b>2,15</b>	<b>2.351.285.000</b>	<b>2,10</b>	<b>2.469.800.000</b>	<b>2</b>	<b>2.594.950.000</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	228	228	266	2,144,732,893	266	2.237.139.000	266	2.349.585.000	266	2.468.000.000	266	2.593.050.000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    Laporan	18	18	41	1,500,000	41	1,600,000	41	1,700,000	41	1,800,000	41	1,900,000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	<b>Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur</b>    Bulan	12	0	0	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>  Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>    Laporan	12	0	0	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  Output : Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Parang	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>    Orang	16	0	0	-	19	12,000,000	19	12,000,000	19	12,000,000	19	12,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>  <i>Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>    Orang	16	0	0	-	19	10,000,000	19	10,000,000	19	10,000,000	19	10,000,000	
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>  <i>Output : Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>    Dokumen	5	0	0	-	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>  <i>Output Tersedanya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Parang</i>	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>    Bulan	12	12	12	92.500.000	12	98.000.000	12	104.000.000	12	110.000.000	12	116.000.000	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>  <i>Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>    Paket	12	12	12	2,500,000	12	2,950,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,200,000	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>  <i>Output : Terkelolanya Barang yang mendukung</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>    Paket	12	12	12	34,000,000	12	35,700,000	12	38,775,000	12	42,000,000	12	44,600,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah															
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	12	2,500,000	12	2,625,000	12	3,000,000	12	3,100,000	12	3,200,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	19,000,000	12	20,000,000	12	21,000,000	12	22,000,000	12	23,000,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	12	12	12	4,500,000	12	4,725,000	12	4,725,000	12	4,900,000	12	5,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Output : Terlaksananya Fasilitas Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	12	12	12	30,000,000	12	32,000,000	12	33,500,000	12	35,000,000	12	37,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Parang	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan	12	12	12	119,400,000	12	125,000,000	12	131,000,000	12	137,000,000	12	143,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	12	14,000,000.00	12	14,300,000	12	15,000,000	12	15,300,000	12	16,100,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	12	4,000,000.00	12	4,200,000	12	4,500,000	12	4,700,000	12	4,900,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	12	12	12	101,400,000.00	12	106,500,000	12	111,500,000	12	117,000,000	12	122,000,000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah    Bulan</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>54,000,000</b>	<b>12</b>	<b>56,000,000</b>	<b>12</b>	<b>58,000,000</b>	<b>12</b>	<b>60,500,000</b>	<b>12</b>	<b>63,000,000</b>	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Output :</b> <b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Parang</b>														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	7	7	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	42,000,000.00	5	42,500,000	5	43,000,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	1	12,000,000.00	1	14,000,000	1	16,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  <b>Outcome :</b> <b>Meningkatnya kualitas pelayanan</b>	<i>Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>    %	100 %	100%											
	<i>1. Nilai indeks Pelayanan Publik</i>    indeks	2,0	2,2	2,4 indeks	27,000,000	2,6 indeks	28,500,000	2,8 indeks	30,000,000	3 indeks	31,500,000	3,2 indeks	33,000,000	
	<i>2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi</i>    %	100	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Parang</b>														
<i>Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1. <i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>    Kegiatan	12	12											
<i>Output : Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan</i>	1. <i>jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif</i>    Kegiatan 2. <i>jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif</i>    Kegiatan	12 13	12 13	12 13	27,000,000	12 13	28,500,000	12 13	30,000,000	12 13	31,500,000	12 13	33,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan//dokumen	13	13	12	<b>27.000.000</b>	12	<b>28.500.000</b>	12	<b>30.000.000</b>	12	<b>31.500.000,</b>	12	<b>33.000.000</b>	
Output : Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Pemberdayaan Desa/ Kelurahan yang berkualitas														
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (%)//persen</b>	100%	100%											



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Outcome :</b> meningkatkan kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Parang	<b>Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial //Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>37,500,000</b>	<b>100</b>	<b>39,500,000</b>	<b>100</b>	<b>41,500,000</b>	<b>100</b>	<b>43,500,000</b>	<b>100</b>	<b>45,500,000</b>	
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa // Kegiatan</i>	<b>12</b>	<b>12</b>											
<i>Output :</i> Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana //kegiatan</i>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>37,500,000</b>	<b>24</b>	<b>39,500,000</b>	<b>24</b>	<b>41,500,000</b>	<b>24</b>	<b>43,500,000</b>	<b>24</b>	<b>45,500,000</b>	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan//laporan	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>37,500,000</b>	<b>13</b>	<b>39,500,000</b>	<b>13</b>	<b>41,500,000</b>	<b>13</b>	<b>43,500,000</b>	<b>13</b>	<b>45,500,000</b>	
<i>Output :</i> Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang														



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
kesejahteraan sosial , kepemudaan , kesehatan , keluarga berencana dan penanganan bencana														
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum// <i>Persen</i>	100%	100%											
<b>Outcome : terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Parang</b>	persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan // <i>Persen</i>	100	100	100	99.000.000	100	104.000.000	100	109.000.000	100	114.000.000	100	119.500.000	
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum    Kegiatan</i>	6	6											



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output : Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	<i>jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif//kegiatan</i>	12	12	12	99.000.000	12	104.000.000	12	109.000.000	12	114.000.000	12	119.500.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan//laporan	6	6	12	99.000.000	12	104.000.000	12	109.000.000	12	114.000.000	12	119.500.000	
Output : Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan														



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan Parang secara partisipatif	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80 // persen	75%	78%											
	1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan // Persen	66,67%	75%	83,33 %	34,665,400	91,66 %	36,500,000	100 %	38,000,000	100 %	40,000,000	100 %	42,000,000	
	2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan// persen	100%	100%	100 %		100 %			100 %		100 %		100 %	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa// Kegiatan	6	6											
Output : terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan // persen	100%	100%	100 %	34,665,400	100 %	36,500,000	100 %	38,000,000	100 %	40,000,000	100 %	42,000,000	
	2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi // persen	100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Output : tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa // dokumen	6	6	12	34,665,400	12	36,500,000	12	38,000,000	12	40,000,000	12	42,000,000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kepuasan ASN Kelurahan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan // Nilai	83.00	85.00											
<b>outcome:</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada	Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan // Skor	83	85	85.50	175,000,000	86.00	185,000,000	86.50	193,000,000	87.00	203,000,000	87.5	213,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Kelurahan Parang</b>														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan Barang milik daerah sesuai prosedur // Bulan	12	0	0	0	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD // Laporan	12	0	0	0	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah  Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah//bulan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	63.000.000	12	66.300.000	12	69.800.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kinerja Kecamatan Parang														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan//paket	12	12	12	1,000,000	12	1,050,000	12	1,475,000	12	1,550,000	12	2,064,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//paket	12	12	12	24,000,000	12	25,200,000	12	26,500,000	12	27,800,000	12	29,190,000	
Penyediaan Peralatan Rumah  Output :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan//paket	12	12	12	1,500,000	12	1,575,000	12	1,654,000	12	2,112,000	12	2,217,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan//paket	12	12	12	6,000,000	12	6,300,000	12	6,615,000	12	6,945,000	12	7,292,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan//paket	12	12	12	2,500,000	12	2,625,000	12	2,756,000	12	2,893,000	12	3,037,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Output : Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD//laporan	12	12	12	25,000,000	12	23,250,000	12	24,000,000	12	25,000,000	12	26,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung kinerja Kecamatan Parang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/bulan	12	12	12	100,000,000	12	105,000,000	12	110,000,000	12	115,500,000	12	121,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan//lapora n	12	12	12	9,000,000.00	12	9,450,000	12	9,922,500	12	10,419,000	12	10,940,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah														
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan//laporan	12	12	12	5,500,000.00	12	5,550,000	12	5,577,500	12	6,081,000	12	7,060,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan//laporan	12	12	12	85,500,000.00	12	90,000,000	12	94,500,000	12	99,000,000	12	103,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Parang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/bulan	12	12	12	15,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	12	18,200,000	12	19,200,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya// unit	3	3	3	5,000,000.00	3	6,000,000	3	6,000,000	3	6,400,000	3	6,750,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perangkat Daerah															
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	JumlahPemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya// unit														
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah		1	1	1	10,000,000.00	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,800,000	1	12,450,000		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan // Persen</b>	100%	100%												
<b>Outcome : meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di</b>	<b>Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan/nilai</b>	78	78	80	860,000,000	82	903,000,000	84	948,500,000	86	996,000,000	88	1,045,500,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Kecamatan Parang</b>														
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat // Kegiatan</i>	8	8											
<i>Output : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif</i>	1. <i>Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif // unit</i>	8		8		8		8		8		8		
	2. <i>Jumlah Laporan IKM // Laporan</i>	1		1		1		1		1		1		
	3. <i>jumlah usulan musrenbangkel yang terfasilitasi // Usulan</i>	10		9	860,000,000	5	903,000,000	4	948,500,000	4	996,000,000	5	1,045,500,000	
	4. <i>jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan // Kasus</i>	1		1		1		1		1		1		
	5. <i>persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial // Persen</i>	75		80		85		90		95		100		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K E T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  <i>Output : Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun//unit	8	9	9	540.000.000	5	567.500.000	4	596.375.000	4	626.000.000	5	657.800.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  <i>Output : Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	8	8	8	310.000.000	8	325.500.000	8	342.125.000	8	360.000.000	8	377.700.000	
Evaluasi Kelurahan  <i>Output : Terlaksananya Pelayanan Publik</i>	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
<i>di Kelurahan sesuai SOP</i>															
<b>TOTAL</b>					<b>3,649,298,293</b>		<b>3,833,439,000</b>		<b>4,023,785,000</b>		<b>4,225,000,000</b>		<b>4,435,350,000</b>		



### 4.3. Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Parang maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

*Tabel 4. 3  
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah*

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Parang	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan // Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa // Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	mendukung tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan sasaran Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Parang	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan // Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



#### 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Parang dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Parang yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2029

Tabel 4. 4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	85,25	85,5	86	86,5	87	87,5	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89	IKU
4	Nilai SAKIP	Skor	89,95	90,20	90,40	90,60	90,80	91	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Parang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Parang	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ 9 parameter IKM : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum</li> </ol>



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
	Kecamatan Parang		2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Parang	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</li> <li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</li> </ol>



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
			3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya  Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya

#### 4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci). Kecamatan Parang merupakan perangkat daerah penunjang yang tidak mengampu urusan , dengan IKK dari Indikator Kinerja Daerah:

Tabel 4. 5  
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Parang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>NIHIL</b>						



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi pegawai Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Parang Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh pegawai Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai Kecamatan Parang Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program/ kegiatan/ sub-kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Parang, 17 Desember 2025

Pt. CAMAT PARANG



**MU JAYIN, S.Sos, M.Si**

NIP.196905281990031004